



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	5
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	

BERSEKONGKOL DALAM TENDER TRANSJAKARTA

Spesifikasi diarahkan ke merek tertentu.

Ninis Chairunnisa

ninis.chairunnisa@tempo.co.id

Penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha selama lebih dari satu tahun atas tender bus Transjakarta menyimpulkan sesuatu yang selama ini jamak dibicarakan namun sulit dibuktikan. Komisi menemukan bahwa pengelola perusahaan peserta tender main mata agar masing-masing kebagian proyek anggaran negara.

Penelitian Komisi Persaingan itu hanya melihat tender tahun anggaran 2013, yang diikuti oleh 18 perusahaan otobus.

Hasilnya, Komisi memastikan mereka bersekongkol untuk memenangkan aneka proyek pengadaan bus Transjakarta.

Putusan Komisi dibacakan pada Rabu pekan lalu. Ketua Komisi Muhammad Nawir mengatakan bukti adanya persekongkolan di antara pengelola perusahaan peserta tender sangat telak. "Sebagai peserta tender, mereka seharusnya bersaing, malah menjalin komunikasi yang intens," katanya, kemarin.

Komunikasi antar-perusahaan itu terlacak melalui nomor *internet protocol* (IP) komputer setiap perusahaan yang sama saat

tender berlangsung. Di Jakarta, lelang pengadaan sekarang melalui jaringan *online* sehingga setiap peserta harus memasukkan penawaran secara daring. Dengan nomor protokol yang sama, kata Nawir,

"Data dimasukkan orang yang sama atau *login* memakai komputer yang sama."

Selain melalui nomor protokol, Komisi melacak sejarah tiap perusahaan. Penyelidik Komisi menemukan beberapa perusahaan memiliki riwayat panjang kerja sama sebelum mengikuti tender pengadaan bus Transjakarta. Dengan fakta itu, kata Nawir, persekongkolan tersebut dalam lelang ini terbuhal.

Persekongkolan itu juga meluas tak hanya antar-peserta tender, tapi juga

peserta tender dengan panitia lelang serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dalam tender ini, kata Nawir, Badan Pengkajian bertugas menentukan spesifikasi bus. Komisi menemukan dugaan rekomendasi Badan mengarahkan pada merk tertentu.

Adapun panitia lelang dianggap bersalah karena meloloskan perusahaan yang tak masuk kualifikasi. "Kami rekomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa mereka," kata Nawir.

Komisi memberi kesempatan kepada perusahaan ini untuk menimbang putusan tersebut selama 14 hari. Perusahaan diminta mengajukan keberatan atau menerimanya. Jika menerima, mereka harus

"Caranya, itu tadi, panitia membuat spesifikasi khusus agar tak bisa disediakan perusahaan lain."

BASUKI TJAHAJA PURNAMA
GUBERNUR JAKARTA

membayar denda sebesar Rp 99 juta-25 miliar sesuai dengan derajat kesalahannya. Jika keberatan, Komisi dalam perusahaan akan maju ke pengadilan.

Putusan Komisi ini disanggah PT Mobilindo Armada Cermerlang. Menurut Manajer Pemasaran Mobilindo Fitriani Djovani, tuduhan soal kesamaan nomor protokol komputer itu janggal karena nomor IP yang sama bisa dimiliki dua orang berbeda. "Kami sudah mengikuti tender sesuai dengan prosedur," kata Fitriani. Mobilindo akan menyampaikan keberatan setelah mereka menerima berkas putusan.

Begitu juga Badan Pengkajian Teknologi. Menurut Marzan Aziz Iskandar, Ketua Badan saat tender

itu berlangsung, lembaganya hanya memberikan perhitungan teknis bus Transjakarta yang diserahkan kepada pemerintah Jakarta. Badan dilibatkan kembali begitu ada penawaran yang masuk. "Kami menilai apakah sesuai dengan spesifikasi, sama sekali tak ikut menentukan tender," kata Marzan.

Menanggapi putusan Komisi itu, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa heran bahwa KPPU baru menemukannya sekarang. Menurut dia, persekongkolan semacam itu lazim dalam proyek-proyek pemerintah. "Caranya, itu tadi, panitia membuat spesifikasi khusus agar tak bisa disediakan perusahaan lain," katanya.

Juru bicara Kejaksaan Agung Tony Spontana mengatakan sedang menunggu putusan Komisi itu. Kejaksaan akan mengkajinya sebelum menindaklanjuti urusan ini ke ranah hukum. "Kami akan bantu, tak akan saya tutupi jika ada anak buah yang terlibat," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah.

● YOLANDA RYAN ARMINDYA | RAYMUNDUS RIKANG



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	5
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	

Mereka Merugikan Negara Rp 392 Miliar

Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan untuk memeriksa lembaga negara dan perusahaan swasta yang terlibat dalam proyek pengadaan bus Transjakarta tahun 2013. Komisi menduga ada persekongkolan dalam proses lelang proyek yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 392 miliar.

Dari semua perusahaan itu, ada 16 yang telah mendapat sanksi dari KPPU. Sanksi itu berupa denda yang totalnya Rp 68,769 miliar. Denda tersebut harus ditanggung renteng oleh mereka, yang nilainya antara Rp 99 juta-25 miliar.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Ketua Majelis Komisi M. Nawir Messi, 18 perusahaan yang mengikuti lelang itu adalah:

PT Adi Teknik Equipindo	PT Antar Mitra Sejati
PT Ifani Dewi	PT Ibana Raja
PT Industri Kereta Api (Persero)	PT Indo Dongfeng Motor
PT Korindo Motors	PT Mayapada Auto Sempurna
PT Mobilindo Armada	PT Srikandi Metropolitan
Cemerlang	PT Sugihjaya Dewantara
PT Putera Adi Karyajaya	PT Transportindo Bakti Nusantara
PT Putriasi Utama Sari	PT Viola Inovasi Berkarya
PT Saptaguna Dayaprima	PT Zonda Indonesia
	PT San Abadi



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	5
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	



Deretan bus Transjakarta merek Yutong dan merek lain yang terparkir di halaman *pool* bus Transjakarta, Cawang, Jakarta Timur.